



PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR DESA PINTU PADANG
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
(STUDI KEBERSAMAAN MASYARAKAT DENGAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

AHMAD ROSYIDIN HASIBUAN
NIM. 1610300030

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023



**PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR DESA PINTU PADANG
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
(STUDI KEBERSAMAAN MASYARAKAT DENGAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**AHMAD ROSYIDIN HASIBUAN
NIM. 1610300030**

Pembimbing I

**Ahmatrijar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005**

Pembimbing II

**Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidempuan, 2023
A.n **Ahmad Rosyidin Hasibuan**

Lampiran : 5 (Lima) Eksampilar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

Di

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ahmad Rosyidin Hasibuan** yang berjudul **Pembangunan Infra Struktur Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kebersamaan Masyarakat Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


Ahmatnjar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Rosyidin Hasibuan
NIM. : 16 103 00030
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / HTN
Judul Skripsi : **Pembangunan Infra Struktur Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi kebersamaan masyarakat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan

apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, **Juni 2023**
Pembuat pernyataan



Ahmad Rosyidin Hasibuan
NIM: 16 103 00030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Rosyidin Hasibuan
NIM. : 16 103 00030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pembangunan Infra Struktur Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kebersamaan Masyarakat Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Juni 2023
Yang menyatakan,



Ahmad Rosyidin Hasibuan
NIM. 16 103 00030



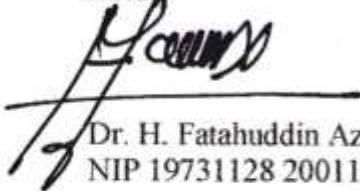
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Ahmad Rosyidin Hasibuan
NIM : 16 103 00030
JUDUL SKRIPSI : Pembangunan Infra Struktur Desa Pintu Padang
Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli
Selatan (Studi kebersamaan masyarakat dengan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Ketua



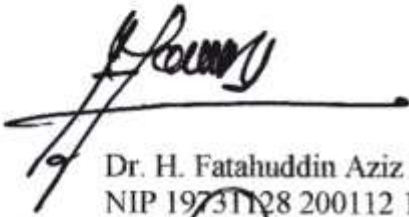
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

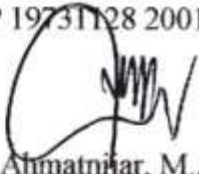
Anggota



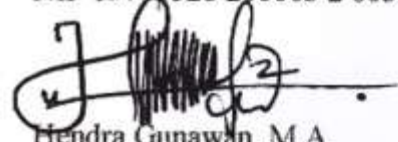
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005



Dr. Almatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



Hendra Gunawan, M.A
NIP 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/Pukul : 06 Juli 2023/15.30 WIB
Hasil /Nilai : 77,75
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,53
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 2341 /Un.28/D/PP.00.9/09/2023

Judul Skripsi : Pembangunan Infra Struktur Desa Pintu Padang
Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan
(Studi kebersamaan masyarakat dengan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Ditulis Oleh : Ahmad Rosyidin Hasibuan
Nim : 16 103 00030
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/HTN

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 08 September 2023
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

ABSTRAK

Nama : Ahmad Rosyidin Hasibuan
NIM : 1610300030
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Judul : **Pembangunan Infra Struktur Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kebersamaan Masyarakat Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi infrastruktur di desa yang masih sangat kurang seperti pembangunan jalan umum, kondisi jalan di desa yang masih kurang baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja infrastruktur desa yang dibangun dan bagaimana membentuk kebersamaan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Pintu Padang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian kualitatif yang mencari makna, sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dan primer dimana peneliti akan mewawancarai langsung perangkat desa di Pintu Padang sedangkan data sekunder dapat berasal dari laporan dan jurnal terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai peran sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, LPMD bekerja sama dengan masyarakat untuk merencanakan pembangunan dan menentukan prioritas program. Sebagai mediator, LPMD memediasi pertemuan antar masyarakat untuk memberikan informasi terkait program pembangunan.

Sebagai motivator, LPMD mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan peduli terhadap pembangunan yang telah dilakukan. Sebagai dinamisator, LPMD memantau, mengawasi, dan mengevaluasi program pembangunan. Namun terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan, seperti keterbatasan dana dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Kata Kunci: *Peran, Kelembagaan, Komunitas, Desa.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad saw, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini berjudul: **“Pembangunan Infra Struktur Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi kebersamaan masyarakat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Khoiruddin Manahan, M.H, sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku Pembimbing II dan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Asiah, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih untuk Teristimewa kepada Ayahanda Tercinta Syawal Hasibuan S.Pdi, dan untuk Ibunda Tercinta Elfiana Siregar.
8. Ungkapan terimakasih kepada saudara/I penulis: Rosyida Hannum Hasibuan Dan Arfan Rasyid Hasibuan yang selalu menjadi penyemangat, serta tempat berbagi cerita bagi penulis.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dari keluarga HTN 2016: yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta do`a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik atas semua dukungan dan motivasi kepada penulis dari teman-teman seperjuangan.

Padangsidempuan, Juni 2023
Penulis

Ahmad Rosyidin Hasibuan
NIM. 1610300030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian.....	12
2. Kebersamaan	12
3. Desa	13
4. Kelembagaan.....	13
5. Pemberdayaan Masyarakat.....	15
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	24
7. Pembangunan Desa	30
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam PerwujudanPembangunan di Desa	33
9. Konsep.....	35
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Informan Peneliti	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Tekhik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	45
1. Desa Pintu Padang.....	45
2. Demografi.....	46
3. Keadan social	47
4. Keadaan Ekonomi	47
5. Visi Misi.....	48
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	50
B. Temuan Khusus	51
1. Lembaga Kemasyarakatan	51
2. Bentuk Kebersamaan Masyarakat dengan Lembaga Kemasyarakatan	51
3. Faktor Pendukung dan Penghambat	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep perubahan sosial yang terus menerus yang diarahkan pada perkembangan dan kemajuan memerlukan pemikiran baru dan cerdas, menyeluruh dan berkelanjutan dikenal dengan istilah pembangunan. Pemerintah Indonesia kini sedang mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan kota, daerah serta desa semakin seimbang, serasi, dan berkelanjutan. Tentu saja pembangunan Nasional pada tahap pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya karena pembangunan di Indonesia tidak merata. Ketidak-merataan pembangunan di Indonesia dapat berdampak salah satunya pada tingginya tingkat kemiskinan.¹

Pemberdayaan pembangunan infra struktur masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena infra struktur merupakan bagian yang dimanfaatkan langsung dalam proses produksi masyarakat. Dengan demikian keberadaan infra stuktur sangat terkait langsung dengan upaya peningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

¹Nafidah dan Suryaningtyas, *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, (Jakarta 2016), hlm, 35.

Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator dengan sungguh-sungguh mendorong terlaksananya otonomi desa. Khususnya terhadap pembangunan desa sehingga timbulnya kesadaran pemerintah desa berpartisipasi dalam pembangunan desa dan masyarakat.² Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan dikawasan pedesaan dapat menyeluruh terhadap masyarakat.

Harjanto mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pada masa sentralisasi atau pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme *top down* yaitu proses perencanaan dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang

² H. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 60.

diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Maka dari itu agar tercapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus berdasarkan pemikiran, kebutuhan, prakarsa, dan keikutsertaan masyarakat. Karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Dalam suatu Hadits Nabi menyampaikan bahwa masyarakat tertentu itulah yang paling faham dengan kebutuhan mereka.

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.” (HR. Muslim)

Disadari bahwa kemajemukan masyarakat dengan tingkat dan model pendidikan yang beragam serta pengalaman yang terbatas akan mengalami banyak kendala ketika mereka mau menentukan model pembangunan dan infra sturktur yang dibutuhkan. Ada keterbatasan wawasan, ketidak-tersediaan fasilitas yang perkiraan jangka panjang akan infra stuktur yang yang dibutuhkan. Dalam kondisi seperti ini, maka kehadiran lembaga refrentasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), LKMD membuat kesepakatan supaya melakukan temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat didesa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 ayat (1) berbunyi desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.³ Kemudian yang lebih terinci lagi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Inilah sebagai landasan hukum dibentuknya LKMD.⁴

LPM dipakai sebagai pengganti nama LKMD. LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan.

Dalam forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni :

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya dewan pimpinan pusat (DPP) LPM.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, yang bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam pembangunan desa, LPMD pada dasarnya merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur

penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Namun kehadiran LPMD sebagai lembaga yang lebih kompeten yang disandingkan dengan komponen masyarakat secara umum akan memberikan warna tersendiri, akan membentuk suatu kebersamaan yang khusus ketika dihadapkan dengan pembangunan infra stuktur desa.

Wilayah penelitian ini berada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan adalah salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Provinsi Sumatera Utara. Desa Pintu Padang merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk usaha pertanian, Sawah, Kebun Karet dengan sistem tumpang sari dengan Salak. Desa Pintu Padang ini adalah salah satu Desa yang berada di kecamatan Angkola Selatan, yang mana keadaan letak Desanya tidak terlalu sulit dijangkau oleh pengguna kendaraan umum/bermotor karena letaknya berada di pinggir jalan raya, untuk menempuh ke Desa tersebut kita bisa menggunakan kendaraan bermotor, angkot dan taxi lainnya.

Masyarakat di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ini merasa diberdayakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan alasan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan

menentukan prioritas usulan program pembangunan. Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tidak menentukan sendiri pembangunan apa yang paling diutamakan atau dibutuhkan di Desa tersebut, akan tetapi tetap bersama masyarakat dalam merancang dan menentukan prioritas pembangunan seperti apa yang dibutuhkan. *LPMD bekerja bersama dan dengan masyarakat dalam melaksanakan suatu pembangunan.*⁵

Keadaan pembangunan di Desa Pintu Padang tersebut sudah lumayan baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dulu keadaan infrastuktur di desa tersebut masih sangat kurang seperti pembangunan jalan umum, keadaan jalan di desa tersebut masih kurang bagus. Sekarang ini infrastrukturnya sudah lumayan bagus. Alasan peneliti kenapa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah karena peneliti melihat LPMD di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut aktif dan bersinergi bersama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Desa Pintu Padang tersebut sekarang ini terus meningkat.

Keadaan suatu desa memang harus terus maju dan meningkat baik dari segi pembangunannya, maka dari itu Strategi LPMD sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan desa. Serta mengerti juga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam pembangunan. Kerjasama LPMD dengan masyarakat desa harus selalu baik begitu juga dengan kerjasamanya dengan unsur pemerintahan desa agar pembangunan berjalan dengan baik juga. Partisipasi dan

⁵ Asmudin, warga masyarakat Pintu Padang, *wawancara di Pintu Padang* pada 12 April 2023.

kebersamaan masyarakat bersama LPMD dalam menyikapi masalah pembangunan infra struktur desa harus tetap diberdayakan untuk menggiring pada tercapai pembangunan desa yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengangkat judul ini dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan Judul **Pembangunan Infra Struktur Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi kebersamaan masyarakat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas yang membicarakan masyarakat, unsur masyarakat, pemerintahan desa, unit masyarakat desa yang dikenal dengan LPMD, serta masyarakat luas. maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu, untuk melihat bagaimana kebersamaan yang terjalin antara masyarakat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja infra struktur desa yang sudah dibangun di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana bentuk kebersamaan Masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan infra stuktur di Desa Pintu

Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja infra struktur desa yang sudah dibangun di di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kebersamaan Masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan infra stuktur di Desa di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan bentuk kebersamaan masyarakat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan infra struktur desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama dalam pembangunan desa mengenai bentuk kebersamaan masyarakat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan infra struktur desa.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Hukum Tata Negara, dan diharapkan dapat juga berguna bagi peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian Kebersamaan, masyarakat, Pengertian Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Fungsi dan juga Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari, Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data, teknik analisa data

Bab IV adalah pembahasan hasil penelitian tentang gambaran infra struktur yang telah dibangun di Desa Pintu Padang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai bentuk upaya mensejahterakan masyarakat. Lalu menggambarkan bagaimana bentuk kebersamaan yang

dilaksanakan oleh masyarakat dan LPMD dalam upaya mensejahterakan masyarakat tersebut.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran, penutup dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁶ Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran tiap konsep sebagaimana yang tertera pada judul penelitian maka perlu dikemukakan penjelasan atau teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

2. Kebersamaan

Kebersamaan adalah kata bersama yang diberi awalan “ke” dan akhiran ‘an’. Bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata verbia atau kata kerja yang diartikan dengan berbarengan, bertepatan, suatu tindakan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kemitraan yang sejajar dan saling menguatkan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. "Rasa kebersamaan" akan membuat masyarakat bekerjasama dengan yang lain untuk tujuan yang sama, membatasi kepentingan pribadi mereka, dan memenuhi kewajiban mereka sehingga dapat terbentuk keharmonisan sosial dan menimbulkan kekuatan yang menentukan bagi pembangunan dan tegaknya suatu peradaban. "Rasa kebersamaan" tersebut diwujudkan dalam sebuah kemitraan yang sejajar antar seluruh stakeholders yang terlibat dalam sebuah

⁶ Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Suntingan LP3ES, 1986), hlm, 60.

program pembangunan.

3. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Kelembagaan

a. Pengertian Kelembagaan

Menurut Ruttan dan Hayami, Kelembagaan adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Menurut Uphoff, Kelembagaan adalah suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

b. Unsur-unsur kelembagaan

Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah:

- 1) Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat. Norma tingkah laku yang mengikat dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur.
- 2) Peraturan dan penegakan aturan/hukum.

- 3) Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota.
- 4) Kode etik
- 5) Kontrak
- 6) Pasar
- 7) Hak milik (property rights atau tenureship)
- 8) Organisasi
- 9) Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

5. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi serta politik, diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka secara mandiri melalui startegi dan pendekatan.

Zubaedi mengutip pernyataan Eddy Ch Papilaya mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan adalah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga

tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.⁸

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki “sesuatu”. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut capacity building atau dalam bahasa sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberi daya atau kuasa, yang bersangkutan harus memiliki kemampuan. Proses capacity building terdiri dari tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia diartikan sebagai pemberian kapasitas kepada individu atau kelompok manusia untuk menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Pengkapasitasan organisasi diibaratkan menyiapkan wadah sebelum meletakkan bahannya diatas wadah tersebut. Pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai. Setelah manusia dan wadahnya dikapitasikan, sistem nilai pun demikian. Sistem nilai adalah aturan main. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem dan prosedur, peraturan

⁸ Randy Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), hlm, 45.

koperasi dan sejenisnya. Tahap ketiga adalah pendayaan. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (skill) ataupun pengetahuan (knowledge). Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.

Berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, Suharto mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah

langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin hendaknya tidak mengabaikan potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas dan merasa cukup. Dalam pemandirian masyarakat miskin diajak untuk mengembangkan jejaring komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh ke depan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik.

Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar dalam penanggulangan kemiskinan. Dikemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

b. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat

dengan 5 P, yaitu:⁹

- a. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dengan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang menguntungkan rakyat kecil.
- d. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm, 65.

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Selain itu ada juga beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat :

- a. Membangun realisasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak menentukan nasibnya sendiri (selfdetermination), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kebersamaan.
 - b. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri, mempertimbangkan keragaman individu.
 - c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-haknya, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar dan melibatkannya dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
 - d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidak setaraan kesempatan.
- c. Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan

Dari kajian-kajian empiris pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, menggambarkan 3 hal dalam lingkup pemberdayaan, yaitu

pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

Pemberdayaan politik lebih mengarah kepada upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan posisi tawarmasyarakat terhadap pemerintah atau pihak-pihak lainnya, yang meliputi aspek- aspek penegakan keadilan, kepemimpinan politik, dan pelayanan publik.

Pemberdayaan ekonomi adalah pendekatan yang diutamakan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktifitas dalam bidang ekonomi dan memiliki penghasilan yang lebih baik, sehingga mampu menanggung dampak negatif dari pertumbuhan yang terjadi.

Pemberdayaan sosial lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyadarkan posisi dan peran seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dalam komunitasnya.

Tingkatan pemberdayaan adalah semacam batasan luasan wilayah dalam proses pemberdayaan. Tingkatan pemberdayaan tiga tingkatan yaitu local level, intermediary level, dan macro level. Maksud dari tingkatan local yaitu dalam batasan wilayah lingkungan sekitar masyarakat tersebut atau pada tataran desa atau sekitar tempat tinggal. Tingkatan intermediary meliputi wilayah kota, jaringan atau hubungan antar organisasi dan pihak eksternal lain. Tingkatan macro adalah tingkatan yang lebih luas dari tingkatan-tingkatan sebelumnya, yaitu setingkat pengambilan keputusan dalam lingkup nasional.

d. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat tidak akan serta merta ikut dan berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

- 1) Kesiediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
- 2) Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
- 3) Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
- 4) Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
- 5) Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.

- 6) Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
- 7) Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- 8) Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (resource) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi masyarakat dan peran serta semua stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.

6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 8 yaitu mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa, dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud yaitu:¹⁰

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas membantu desa dalam pelaksanaan

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.

urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak.

Untuk mengetahui seberapa besar peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah pedesaan.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan

Sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.¹² Salah satu tugas dari LPMD adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPMD Sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat

¹¹ Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 29 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan*.

¹² Arie Sujiito , Sutoro Eko, *Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi*, (Universitas Pattimura, IRE Press, 2002), hlm, 50.

dibidang pembangunan, maka Peran LPMD sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan di Pintu Padang dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Desa/MusrenbangDes. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (MusrenbangDes) tingkat Desa adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan desa yang melibatkan para pelaku pembangunan Desa tujuan, musrenbangDes antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya Desa.
- e. Menetapkan prioritas kegiatan Desa yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Peran LPMD sebagai fasilitator di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPMD selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap

perangkat-perangkat Desa. Peran LPMD di Desa Pintu Padang memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPMD didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat desa yang mewakili warga masyarakat Desa Pintu Padang.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai fasilitator adalah :

- a. Masyarakat ikut merencanakan pembangunan
 - b. Masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program pembangunan
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Mediator

LPMD sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan Desa terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPMD Pintu Padang mensosialisaikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga desa dan juga melalui bentuk undangan rapat.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai mediator adalah :

- 1) Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan.
- 2) Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia.¹³

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi

¹³ Mubyarto. *Pembangunan Pedesaan*. (Yogyakarta: P3PK UGM, 1984), hlm, 43.

lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai motivator adalah :

- 1) Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun
- 2) Masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPMD jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi

dalam proses pembangunan dan pemerintahan.¹⁴

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai dinamisator adalah :

- 1) LPMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan.
- 2) LPMD melakukan evaluasi pada program bangun.

7. Pembangunan Desa

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan buruk menuju keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Menurut SP Siagian (1983), pembangunan itu sendiri adalah suatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (NationBuilding).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan

¹⁴ Opcit, Arie Sujiito, Sutoro Eko

terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni : harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahannya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: “pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.”

¹⁵Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu,

¹⁵ Ibid

pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil yaitu:

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.

4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Perwujudan Pembangunan di Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dibentuk sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di desa dengan perubahan atau penyederhanaan pada susunan organisasi dalam mewujudkan masyarakat dalam pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan agar dapat terlibat secara nyata dan langsung baik dalam perencanaan maupun sebagai pelaksanaan dalam bidang pembangunan.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa difasilitasi oleh Kepala Desa dengan motor penggeraknya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan partisipasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang tujuan pembentukannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendukung program

pembangunan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan. Tingkat partisipasi pembangunan di suatu desa dapat dikatakan sangat juga dipengaruhi oleh sejauh mana kinerja pengurus LPMD dan partisipasi masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung program yang direncanakan, dan juga harus terciptanya hubungan yang harmonis antara LPMD dengan Kepala Desa, serta organisasi-organisasi yang ada di desa. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ke arah pembangunan dapat dilihat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugasnya yaitu :

1. Merencanakan pembangunan yang partisipatif, yaitu melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, yaitu menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan secara terpadu, baik berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, yaitu melaksanakan pembangunan sesuai dengan memanfaatkan alokasi dana yang tersedia baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat dan mengendalikan jalannya pembangunan agar hasil yang di dapat sesuai dengan fungsinya. Mengendalikan pembangunan dapat juga berupa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan agar fungsinya dapat tetap berjalan untuk jangka waktu yang cukup lama.

9. Konsep

Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial.¹⁶ Defenisi konsep memberikan batasan terhadap pembahasan dari permasalahan yang ditentukan oleh peneliti. Adapun defenisi konsep dari penelitian ini, yaitu:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LPMD adalah lembaga atau wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sertabertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dengan berupaya mewujudkan masyarakat yang partisipatif. Dimana peran LPMD dapat dilihat dari 4 fungsinya dengan mengkaji indikator yang ada didalamnya, yaitu :

1) LPMD sebagai fasilitator

- a) Masyarakat ikut dalam merencanakan pembangunan.
- b) Masyarakat ikut dalam menentukan prioritas usulan program pembangunan.

2) LPMD sebagai Mediator

- a. Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan.
- b. Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan.

3) LPMD sebagai Motivator

- a) Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun.

¹⁶ Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: Suntingan LP3ES, 1986), hlm, 60.

b) Masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat.

4) LPMD sebagai Dinamisator

- a) LPMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan.
- b) LPMD melakukan evaluasi pada program pembangunan.

b. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan agar terlibat secara nyata dan langsung baik dalam perencanaan maupun sebagai pelaksanaan dalam bidang pembangunan. Dimana fungsi LPMD ke arah pembangunan dapat dilihat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugasnya, yaitu :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prasarana yakni segala sesuatu yang berfungsi sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jenis-jenis kegiatan pembangunan fisik yang menunjang terselenggaranya pemerintahan desa Pintu Padang dalam mewujudkan masyarakatnya yang sejahtera berdasarkan visi-misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dan menemukan sudah ada beberapa penelitian mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (Universitas Nasional Makassar, 2011) yang berjudul *“Peranan LPM dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu : Studi diKecamatan Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”*. Membahas tentang Peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat, dan sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu.

Penulis juga menemukan yang pembahasannya tentang peran LPM dalam pembangunan, yaitu yang dikerjakan oleh Firana (Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2014) yang berjudul yaitu *“Peranan LPM Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam”*

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator masih rendah
2. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator sudah berjalan dengan semestinya
3. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai otivator sudah baik, tetapi

bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Karas dalam perawatan

4. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai dinamisator tidak berjalan dengan baik.

Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membicarakan tentang pembangunan infra sturuktur di Desav Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan secara khusus bagaimana kebersamaan antara masyarakat dan lembaga LPMDnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pintu Padang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April-Juni 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus karena berusaha untuk mengetahui kebersamaan masyarakat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan yang ada di Desa Pintu Padang.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai model kebersamaan masyarakat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan infrastruktur Desa dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi dalam kebersamaan masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Pintu Padang. Berikut jenis- jenis penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Studi Kasus, yaitu dalam meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi.
- b. Fenomenologi, yaitu menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian.
- c. Teori Dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Dalam sumber data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat, perangkat desa, dan LPMD yang ada di Desa Pintu Padang.
2. Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁸

D. Informan Peneliti

Informan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu :

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti.
2. Informan utama adalah mereka yang terlihat secara langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut :

Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Perangkat desa, Ketua LPMD, serta perangkat struktur LPMD lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait

¹⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

dengan gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.²⁰ Dengan demikian peneliti langsung ke lokasi melihat secara jelas dan langsung bagaimana bentuk kebersamaan masyarakat dengan LPMD serta apa saja model infrastruktur yang mereka bangun untuk mensejahterakan masyarakatnya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan.²¹ Wawancara yang dilaksanakan adalah dengan bentuk wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang telah disebutkan di atas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

²¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004), hlm. 39.

dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi atau bukti terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini antara lain rencana pembangunan desa.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan material lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti.²²

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan di bawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.

²² Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Desa Pintu Padang

Desa Pintu Padang merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, Secara administratif, wilayah Desa Pintu Padang memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hutan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sinyior

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Napa

Luas wilayah Desa Pintu Padang adalah $\pm 43,59$ Ha yang terdiri dari 80% berupa Sawah dan Kebun, serta 15,5% berupa Pekarangan atau Pemukiman. 4,5% berupa lain-lain (Sungai/Kuburan/Jalan/Sekolah). Sebagaimana wilayah tropis, Desa Pintu Padang mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah Hutan.

Jarak pusat Desa dengan Ibu kota Kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 38 km. Kondisi prasarana jalan menuju Desa yang melalui jalan Provinsi dengan kondisi sangat bagus sehingga waktu

tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 1 jam. Sedangkan jarak pusat Desa dengan Ibukota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 1 km. Kondisi ruas jalan poros Desa yang dilalui juga berupa jalan Provinsi dengan kondisi sangat bagus sehingga waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 10 menit.

Desa Pintu Padang merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk usaha Pertanian, Sawah Kebun Karet dengan sistem Tumpang Sari dengan Salak. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta untuk persawahan dengan masih memakai sistem irigasi yang sangat sederhana. Berdasarkan kondisi Desa ini maka akan dijabarkan permasalahan, potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramakan untuk 6 (enam) tahun.

2. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Pintu Padang adalah 820 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel. 4.1
Jumlah Penduduk

Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
397 Jiwa	423 Jiwa	223 KK

Sumber: Profil Desa Pintu Padang tahun 2022

Tabel. 4.2
Jumlah Penduduk Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0 – 5 tahun	97
2.	6 – 10 tahun	136
3.	11 – 20 tahun	150
4.	21 – 30 tahun	165
5.	31 – 40 tahun	98
6.	41 – 50 tahun	86
7.	51 – 60 tahun	50
8.	60 tahun keatas	38
Total		820 Jiwa

Sumber: Profil Desa Pintu Padang tahun 2022

3. Keadaan sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun nonformal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Pintu Padang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel. 4.3
Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	97 Jiwa
2	SD	130 Jiwa
3	SMP	75 Jiwa
4	SMA	70 Jiwa
5	Diploma/Sarjana	58 Jiwa
6	Tidak Sekolah	11 Jiwa

Sumber: Profil Desa Pintu Padang tahun 2022

4. Keadaan Ekonomi

Wilayah Desa Pintu Padang memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan kota dan pusat

kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun nonformal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Pintu Padang.

Tabel. 4.4
Jumlah Penduduk Keadaan Ekonomi

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum Bekerja	60 Jiwa
2	Mengurus Rumah Tangga	20 Jiwa
3	Pengrajin	2 Jiwa
4	Pegawai Negeri Sipil	10 Jiwa
5	Pensiunan	2 Jiwa
6	TNI	1 Jiwa
7	POLRI	1 Jiwa
8	Petani	320 Jiwa
9	Pedagang	20 Jiwa
10	Karyawan Swasta	7 Jiwa
11	Guru	6 Jiwa
12	Bidan	1 Jiwa
13	Supir	4 Jiwa
14	Wiraswasta	5 Jiwa
15	Lainnya	24 Jiwa

Sumber: Profil Desa Pintu Padang tahun 2022

5. Visi Misi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Pintu Padang dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka Visi Desa Pintu Padang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“PINTU PADANG SEHATI”

Visi tersebut memiliki 3 (tiga) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut:

a. Sejahtera, yaitu :

1) Meningkatkan penghasilan warga

2) Melancarkan roda perekonomian

3) Menciptakan lapangan kerja

b. Harmonis, yaitu :

1) Melaksanakan tugas pemerintahan secara transparan

2) Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup bersih

3) Memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba

c. Tertib, yaitu :

1) Melestarikan tradisi gotong-royong

2) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan

3) Menciptakan masyarakat yang aman dan damai

4) Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai visi Mewujudkan Masyarakat SEHATI melalui Peningkatan Usaha Pertanian tersebut diatas, Desa Pintu Padang telah menetapkan misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dari berdaya saing berbasis potensi lokal.

b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum.

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berahlak mulia.

d. Memfasilitasi pelatihan-pelatihan tentang berwirausaha.

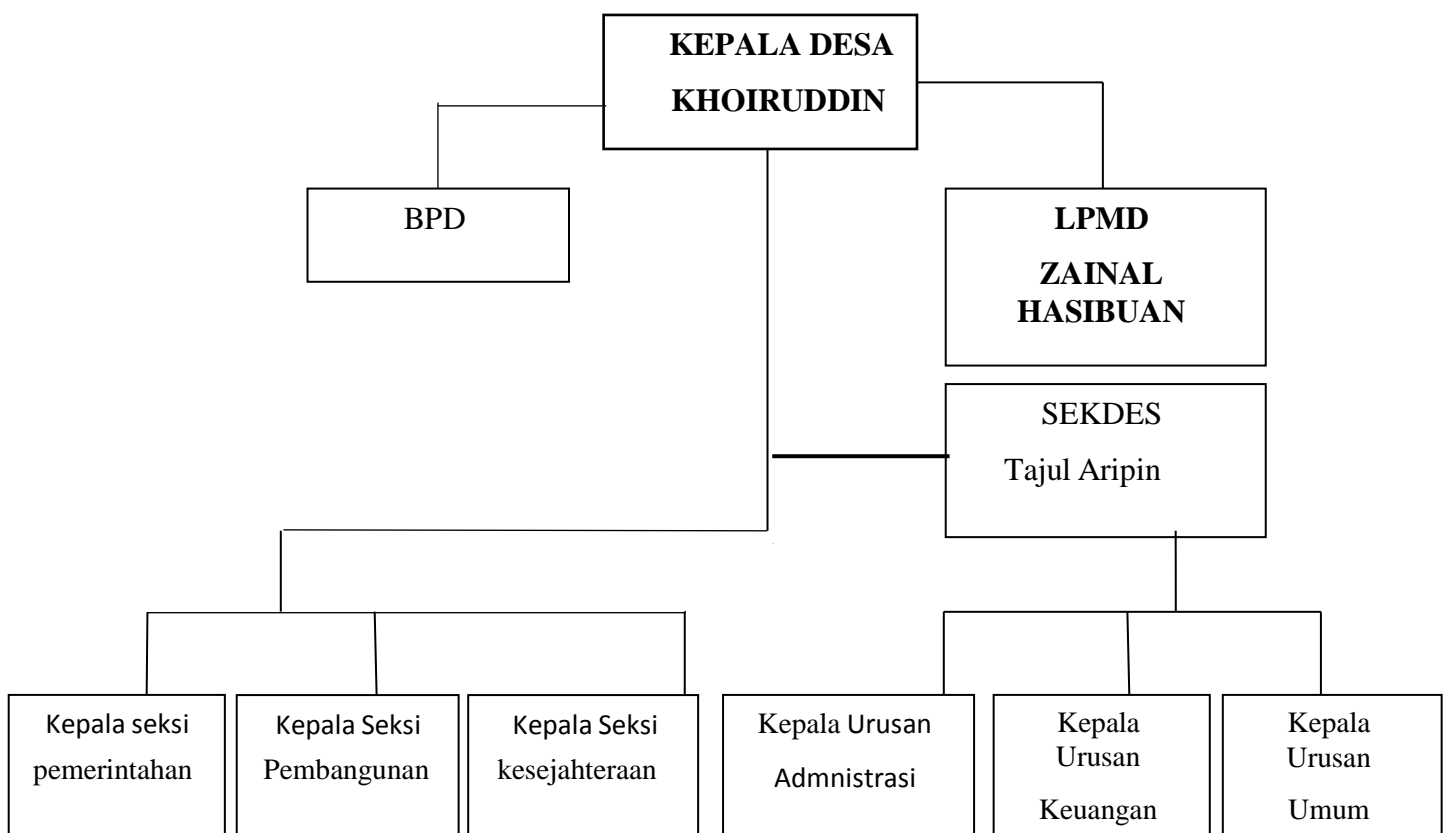
e. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil pertanian.

f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintah Desa Pintu Padang menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam bagan berikut.

Bagan 1.
Struktur Organisasi Pemerintah Desa



B. Temuan Khusus

1. Infra Struktur atau Sarana Prasarana yang ada di Desa Pintu Padang

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Pintu Padang terdapat hasil pembangunan Sarana dan Prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel. 4.5
Infra Struktur atau Sarana Prasarana

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Kantor Kepala Desa	1
3	Polindes	1
4	Masjid	1
5	Musholla	1
6	Posyandu	1
7	Pos Kamling	1
8	TK/PAUD	1
9	SD	1
10	TPQ/MDTA	1
11	Jalan Hotmix	1
12	Jalan Situ/Koral	1
13	Jalan Rabat Beton	3
14	Pemakaman Umum	1

Sumber: profil desa pintu padang 2022

2. Bentuk Kebersamaan Masyarakat dengan Lembaga Kemasyarakatan

Selain masyarakat, pemerintah desa dan BPD, ada lembaga lembaga lain yang juga berperan penting dalam bergandenga-tangan dan bekerjasama dengan masyarakat secara umum dalam melaksanakan pembangunan desa yakni LPMD. Lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan desa adalah lembaga kemasyarakatan. Lembaga non pemerintah ini dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan,²³ antara lain :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- b. Tim Penggerak PKK
- c. RT/RW
- d. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
- e. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)

Karena penulis berbicara tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka penulis hanya akan membahas tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa yang ada di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ini.

Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kegiatan LPMD di semua tingkatan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Kegiatan LPMD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputi :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan

Dasar pembentukan LPMD di Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan. LPMD Pintu Padang resmi

²³ Khoiruddin, Kepala desa Pintu Padang, *wawancara di pintu Padang* pada 15 April 2023

terbentuk dan disahkan pada tanggal 22 november 2007, Sumber Dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa diperoleh dari :

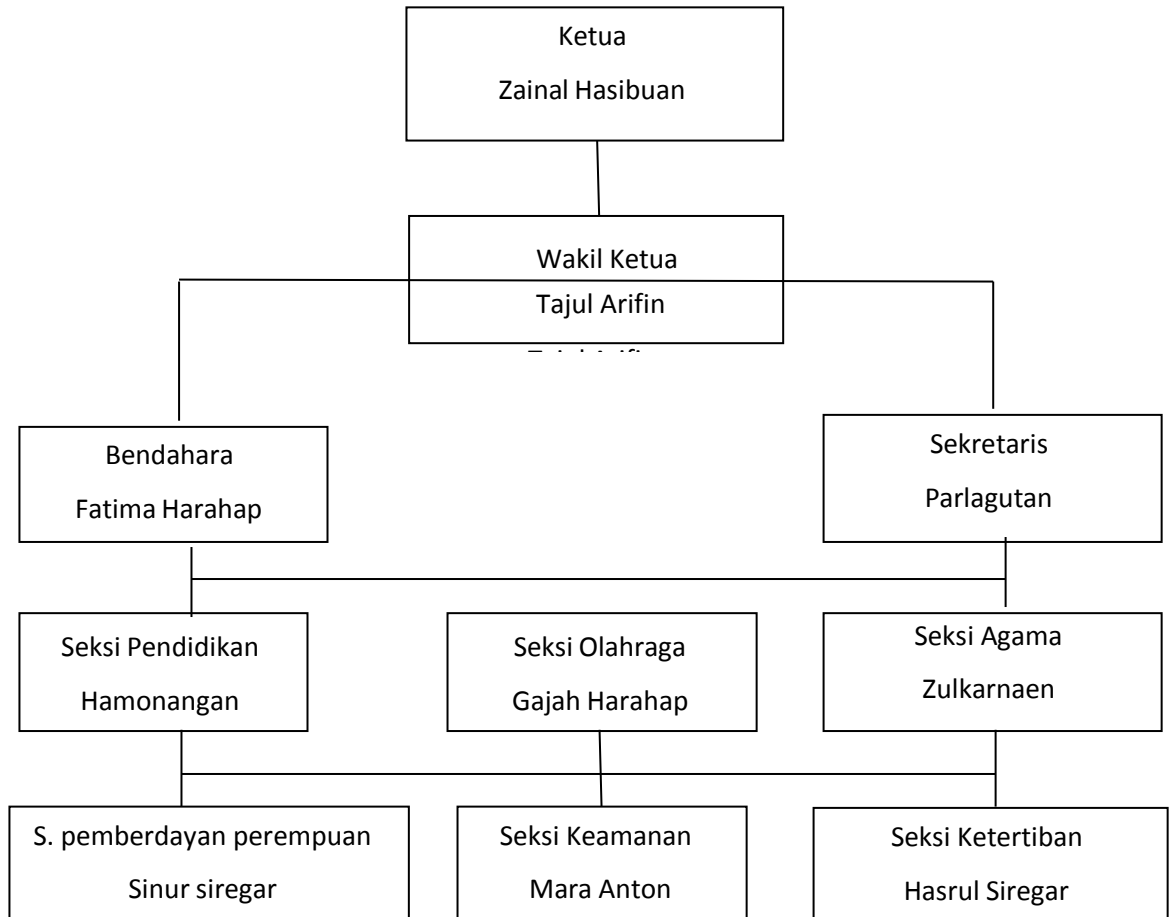
- a. Swadaya masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.²⁴

Kepengurusan LPMD dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh kepala desa. Susunan Pengurus LPMD ditetapkan terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Seksi-seksi terdiri dari : (d disesuaikan dengan kebutuhan)

²⁴ Khoiruddin, Kepala desa Pintu Padang, *wawancara di pintu Padang* pada 20 April 2023

Bagan .2.
Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pintu Padang
Kecamatan Angkola Selatan



Sumber : Profil Desa Pintu Padang tahun 2022

Untuk mengetahui gambaran kebersamaan masyarakat dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa di Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan, dalam menghasilkan infra struktur desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat.

Menurut Zainal Hasibuan²⁵ lembaga ini memiliki dan peran sebagai pembersama masyarakat walaupun pada dasarnya disebutkan bahwa LPMD

²⁵ Zainal Hasibuan, Ketua LPMD desa Pintu Padang, wawancara di Pintu Padang pada 15 April 2023

sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah dengan menggunakan masing-masing indikatornya.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai fasilitator

Agar dapat melihat kebersamaan masyarakat dengan LPMD sebagai fasilitator di Desa Pintu Padang, ada beberapa indikator yang dikaji didalamnya yaitu:

1) Masyarakat dan LPMD secara bersama merencanakan pembangunan

Untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang masyarakat bersama LPMD merencanakan pembangunan sebagai yang diungkapkan oleh Zainal Hasibuan bahwa selama ini masyarakat dengan LPMD selalu bersama merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pintu Padang. Maka penulis mengajukan pertanyaan, Apakah LPMD pernah mengadakan rapat/musyawarah terkait hal perencanaan pembangunan di desa pintu padang?

“pernah, untuk rapat tentang perencanaan pembangunan masyarakat dengan LPMD sebenarnya tidak begitu rutin dilaksanakan, tapi saya selaku masyarakat di desa ini, saya wajib untuk menghadiri musyawarah LPMD tersebut”.²⁶

Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pernah, karena sebelum program itu turun di Desa yang biasanya harus diajukan dari tingkat bawah dulu dengan diadakan Musrenbang TK. Desa dan seterusnya”.²⁷

²⁶ Sinur Siregar, Bidang Pemberdayaan Perempuan LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 April 2023

²⁷ Tajul Arifin, Sekretaris Desa Pintu Padang, Wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 April 2023

Hal senada disampaikan oleh informan Bapak Tagijuddin warga Desa Pintu Padang.

“pernah, tapi tidak selalu rutin, dan saya juga pernah beberapa kali menghadiri undangan musyawarah tersebut”.²⁸

Untuk memperkuat data maka ditanyakan secara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPMD Pintu Padang) dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjalankan program LPMD di Pintu Padang? Adapun jawaban yang diberikan :

“partisipasi masyarakat sangat kurang dalam menjalankan program LPMD karena kurang kesadaran masing-masing individu, jaman sekarang rasa kebersamaan dan gotong royong sudah sangat berkurang, hal itu dikarenakan masyarakat menganggap aparat atau lembaga sudah digaji Pemerintah dan mereka menganggap itu sudah menjadi tugas mereka”.²⁹

2) Masyarakat bersama LPMD Menentukan Prioritas Usulan Program

Untuk memperoleh informasi yang jelas sekitar Masyarakat bersama LPMD Menentukan Prioritas Usulan Program adalah dengan melihat apa saja yang dilakukan masyarakat dalam menentukan Prioritas dalam Pembangunan Program Pemerintah yang akan dilaksanakan di Desa Pintu Padang.

“Kalau berbicara tentang Prioritas, tentunya yang paling menjadi masalah adalah masyarakatnya sendiri, pasti yang sangat dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu”.³⁰

²⁸ Tagijuddin, masyarakat Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 22 April 2023

²⁹ Zainal Hasibuan, ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

³⁰ Aswan Siregar, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

Demikian halnya penuturan dari Ibu Sinur selaku Bidang Pemberdayaan Perempuan LPMD :

“Yang saya lakukan dalam menentukan Prioritas dalam Pembangunan Program di Desa Pintu Padang hanya untuk kepentingan orang ramai masyarakat umum, tentu harus dilaksanakan secara bersama”.³¹

Oleh pelaku LPMD di Desa Pintu Padang mengungkapkan sebagai berikut :

“Penentuan Prioritas dapat dilihat dulu apa yang sangat dan amat dibutuhkan oleh masyarakat, yang di Prioritaskan untuk kepentingan bersama dan ikut mensosialisasikan apa-apa saja yang sudah di programkan Pemerintah setelah itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan warga”.³²

Kemudian hal tersebut dipertegas lagi oleh salah satu seorang tokoh pemuda yang aktif berpartisipasi dalam LPMD di Desa Pintu Padang yang menyebutkan sebagai berikut :

“Prioritas dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Musrembang tingkat desa dilakukan setahun sekali”.³³

Kemudian Ketua LPMD Desa Pintu Padang memberikan gambaran bahwa kebutuhan Program LPMD ini di Desa Pintu Padang adalah :

“Sebenarnya sangat dibutuhkan, hanya saja terkadang masyarakat no coment dengan program LPMD mereka menganggap LPMD tidak bisa berbuat apa-apa yang selama ini ada pembangunan dan lain-lain itu hanya desa yang berbuat, padahal disamping desa LPMD, masyarakat ikut berperan penting dalam program yang dijalankan oleh

³¹Sinur segar, Bidang Pemberdayaan Perempuan LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di desa pintu padang pada 20 April 2023

³²Tajul arifin, Sekretaris desa Pintu Padang, wawancara di desa pintu padang pada 20 April 2023

³³Saipul ahyar, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Pintu Padang pada 27 April 2023

Pemerintah”.³⁴

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Mediator

1) Masyarakat bersama LPMD ikut dalam rapat yang diadakan

Untuk memperoleh informasi terkait Masyarakat bersama LPMD ikut dalam rapat yang diadakan di desa Pintu Padang sebagai berikut :

“Tentunya saya pernah karena saya juga Kepala Desa disini, dan berdasarkan absen yang saya lihat, memang ada masyarakat yang datang. Akan tetapi tidak dari semua masyarakat yang hadir”.³⁵

Pendapat lain adalah sebagai berikut:

“Ya pernah, yang diadakan LPMD yaitu rapat yang dibahas Program apa saja yang akan dilakukan di Desa Pintu Padang, dan pengurus selalu memberikan undangan kepada masyarakat untuk menghadirinya”.³⁶

Masih dalam perbincangan yang sama Bapak Zainal Hasibuan memberikan komentar bahwa:

“Menurut saya pernah, masyarakat yang ikut dalam rapat ditingkat desa hanya mereka yang mewakili yang dipilih dalam musyawarah desa, yang duduk sebagai perwakilan beberapa mengusulkan kebutuhan di desa, seperti sarana dan prasarana yang belum ada di tempat mereka tinggal”.³⁷

2) Masyarakat bersama LPMD saling Memberikan Informasi Bagi Berjalannya Program Pembangunan

Bagaimanapun keberadaan Masyarakat bersama LPMD akan saling mendukung dan memberikan informasi demi berjalannya program

³⁴ Zainal Hasibuan, Ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

³⁵ Khoiruddin, Kepala Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 April 2023

³⁶ Sinur Siregar, Bidang pemberdayaan Perempuan LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 April 2023

³⁷ Zainal Hasibuan, Ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

pembangunan infra struktur desa Pintu Padang.

Terkait apakah masyarakat pernah memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan, diperoleh informasi bervariasi sebagai berikut :

“kami sering memberikan informasi kepada masyarakat, contohnya untuk membentuk organisasi atau kelompok karena bantuan pemerintah harus berkolompok”.³⁸

Keterangan tambahan juga diperoleh dari pelaku LPMD Pintu Padang yaitu Ibu Sinur Siregar. Adapun kutipan dari wawancaranya yaitu:

“Ya seperti dikatakan, melalui musyawarah itulah masyarakat dan LPMD atau kami bisa saling membagi informasi dan mendapat informasi-informasi dari masyarakat, akan tetapi informasi yang saya berikan belum tentu sama dengan yang lain. Jadi semakin banyak masyarakat yang hadir, semakin banyak kami bisa mendapat informasi. Jadi masyarakat juga lah yang menentukan”.³⁹

Keterangan tambahan kami peroleh dari pelaku LPMD lainnya. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“ya, tetapi karena keterbatasan LPMD, informasi yang diterima oleh masyarakatpun hanyalah sekedar informasi, tetapi tidak berjalan dengan baik”.⁴⁰

Hal senada yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat Desa Pintu Padang.

“Tentunya, jika ada kesempatan pasti sanya menyampaikan informasi yang dapat kami sampaikan kepada LPMD tergantung LPMD menindak lanjutinya”.

³⁸ Aswan siregar, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

³⁹ Sinur siregar, Bidang Pemberdayaan Perempuan LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 April 2023

⁴⁰ Hamonangan, seksi pendidikan LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 27 April 2023

Kemudian diperkuat pula keterangan terkait apakah ada hambatan dalam mensosialisasikan program LPMD dan apakah masyarakat juga memberikan pendapatnya? Jawaban yang diperoleh :

“Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang LPMD sangat kurang, sumber daya masyarakat desa Pintu Padang masih rendah dan kurang terorganisirnya masyarakat baik secara organisasi, dan untuk informasi dari masyarakat mungkin kami hanya bisa dapat dari desa masing-masing”.⁴¹

c. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagai motivator

1) Masyarakat Memamfaatkan Pembangunan yang Sudah Dibangun

Partisipasi masyarakat bersama LPMD tetap berjalan meski masih tergolong rendah. Nyatanya apabila masyarakat tidak mau ikut bekerja dalam membangun serta mensukseskan pembangunan yang telah dibuat oleh LPMD, seperti halnya yang dikatakan oleh seorang Ibu yang pernah ikut berpartisipasi dengan pertanyaan sebagai berikut : Berikan penjelasan apakah selama ini Bapak/Ibu sudah memamfaatkan tempat yang sudah dibangun LPMD Pintu Padang? Adapun jawaban semua informan mempunyai persamaan, yaitu :

“Iya, contohnya perbaikan jalan yang berlubang atau rusak dan memamfaatkan gedung serbaguna untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sipatnya untuk kepentingan warga sekitarnya”.⁴²

Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh masyarakat dari Kelompok Tani Desa Pintu Padang yang mengatakan :

“Sudah, salah satunya MCK yang dibangun pas dilokasi tempat

⁴¹ Zainal Hasibuan, Ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

⁴² Aswan siregar, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 April 2023

*saya tinggal yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.*⁴³

Jawaban dari informan lain yaitu

*“Menurut saya cukup dimanfaatkan, contohnya perbaikan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Seperti istri saya juga, sebagai mana ibu-ibu juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari bidang Pemberdayaan Perempuan. Dan saya melihat itu sangat bermanfaat bagi istri saya yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga”.*⁴⁴

Untuk memperkuat data dengan permasalahan di atas terkait apakah selama ini masyarakat sudah memanfaatkan tempat yang dibangun oleh LPMD desa Pintu Padang, maka informasi yang diperoleh adalah:

*“Menurut penilaian saya masyarakat sudah maksimal memanfaatkan pembangunan, mayoritas prasarana sosial dasar yang dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat Pintu Padang”.*⁴⁵

2) Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan yang Sudah Dibuat.

Partisipasi masyarakat didalam perawatan pembangunan yang telah dibuat merupakan rasa peduli karena masyarakat yang menikmati hasil pembanguna tersebut. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat, berikut kutipan wawancaranya:

*“Tergantung kesadaran masyarakat itu sendiri, saya berharap masyarakat bisa lebih sadar untuk dapat menjaga pasilital yang sudah diberikan. Yang dapat saya lihat ada masyarakat yang mau menjaga dan tentunya dan juga yang berlaku cuek dan acuh”.*⁴⁶

Selanjutnya hal senada yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat

⁴³ Mariati, Ketua Bidang PKK Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 27 April 2023

⁴⁴ Saipul ahyar, Tokoh Masyarakat Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

⁴⁵ Zainal hasibuan, Ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

⁴⁶ Aswan siregar, Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 april 2023

Bapak Merdan yang menjelaskan bahwa :

*“Iya mau, tetapi hanya sebagian saja karena rasa memiliki tersebut kurang, mereka berpikir jika nanti fasilitas yang sudah disediakan rusak, toh Pemerintah bantu lagi mereka tidak merasa rugi karena mereka anggap bukan uang dari mereka”.*⁴⁷

Demikian halnya penuturan informan Bapak Asmudin warga

Desa Pintu Padang yaitu :

“Itu untuk kami juga, tentunya kami masyarakat harus sadar karena itu merupakan kepentingan kami mudah-mudahan kami masyarakat desa ini bisa menjaganya”.

Kepala Desa Pintu Padang juga mengutarakan pendapatnya, berikut kutipan wawancaranya :

*“Itulah yang menjadi kendala terbesar dilingkungan masyarakat kami, bangunan yang sudah dibangun sudah difasilitasi jangankan mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga yang baik, malah sebagian besar mereka mengabaikan program atau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah”.*⁴⁸

Sedangkan menurut penilaian Bapak Zainal bahwa kebersamaan masyarakat desa pintu Padang dalam merawat pembangunan yang telah dibuat oleh LPMD desa Pintu Padang adalah :

*“Ya, memang harus seperti itu maksudnya setelah selesai pembangunan dan didalam musyawarah desa serah terima masyarakat membentuk satu tim yang dinamakan dengan Tim Pemantau atau dikenal dengan TP3 (Tim Pemeliharaan, Pelestarian, Pembangunan)”.*⁴⁹

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator

- 1) LPMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan Program Pembangunan.

⁴⁷ Merdan, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Pintu Padang pada 27 april 2023

⁴⁸ Khoiruddin, Kepala Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 april 2023

⁴⁹ Zainal hasibuan, Ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 april 2023

Untuk mengetahui seberapa jauh LPMD bersama masyarakat dalam pengawasan adalah:

*“Menurut pribadi saya, selama ada LPMD disini tidak ada yang melakukan pengecekan secara berkala, baik bangunan yang telah dibangun, mereka anggota LPMD melakukan pengecekan disaat awal, berjalannya kegiatan dan berakhirnya kegiatan dan setelah selesai proses itu semua sama sekali tidak ada”.*⁵⁰

Ini boleh jadi karena adanya kebersamaan sehingga pengawasan secara sepihak kurang dibutuhkan Hal senada disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Desa Pintu Padang :

*“Sebagian besar fisik yang telah dibangun didesa kami, ya begitu adanya berjalan semestinya. Sebagai Tokoh Masyarakat Desa Pintu Padang saya belum pernah melihat Ketua LPMD melakukan secara langsung dilapangan jika pemabangunan tersebut sudah selesai dibangun”.*⁵¹

Ungkapan yang berkaitan dengan ini adalah bahwa

*“Nah ini masalah nya, selama ini memang tidak pernah ada pemantauan yang dilakukan oleh Fasilitator, sebab disini juga tidak ada hukuman yang berat atau tidak ada aturan yang mengikat dari pihak berwenang. Yang penting sudah melakukan apa yang di program kan, terlepas itu bagus atau tidaknya tergantung masyarakat yang menanggapi”.*⁵²

2) Masyarakat dan LPMD Melakukan Evaluasi pada Program Pembangunan

Pertanyaan terkait ini adalah apakah selama berjalannya program LPMD di Desa Pintu Padang ada evaluasi terhadap pembangunan?

Bapak Khoiruddin memberikan informasi bahw:

⁵⁰ Khoiruddin, Kepala Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 april 2023

⁵¹ Merdan, Tokoh Masyarakat Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 27 april 2023

⁵² Zainal hasibuan, Ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

*“Baik tidaknya dari hasil pembangunan tersebut masyarakat yang menentukan, dari pihak LPMD tidak ada melakukan pengecekan kembali seperti diutarakan pertanyaan tersebut”.*⁵³

Hal senada juga diutarakan oleh informan lain yaitu :

“Setau saya, selama saya tinggal di daerah ini evaluasi yang dilakukan, apa yang diperbuat itulah yang masyarakat terima, sebab masyarakat disini kurang mengambil tahu tentang adanya kegiatan daerahnya sendiri”.

Untuk memperkuat data tersebut adalah :

*“Jika tidak ada pemantauan sudah tentu tidak ada jangka waktu yang dilakukandi LPMD tersebut”.*⁵⁴

Berikut juga disampaikan pendapat Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Wahidin Harahap. Berikut pernyataannya :

*“Sejauh pemantauan kami, untuk perbandingan desa, Desa pintu Padang sudah cukup menjalankan dengan baik, desa ini juga pernah dalam satu kalimendapatkan penghargaan dari salah satu Kelurahan dalam kegiatan yang mereka lakukan dengan membuat kebun dengan pemanfaatan pekarangan rumah masyarakat yang hasilnya sangat membantu masyarakat, tetapi untuk kinerjainternal mereka sendiri dan hubungan mereka dengan masyarakat, saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya hanya melihat program apa yang mereka laksanakan. Dan beberapa program sudah dilaksanakan. Selain itu, LPMDnya juga belum lama terbentuk jadi untuk sejauh ini saya rasa itu sudah lumayanbaik”.*⁵⁵

Terkait masalah dan tantangan apa secara umum yang dihadapi LPMD di Desa Pintu Padang apa yang menjadi masalah dan tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan LPMD sampai saat ini?

Jawabannya adalah sebagai berikut :

⁵³ Khoiruddin, kepala Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 April 2023

⁵⁴ Zainal hasibuan, Ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 April 2023

⁵⁵ Aswan siregar, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 April 2023

*“Sama seperti yang saya utarakan dipertanyaan sebelumnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat ini sebenarnya tidak dikatakan baik di desa ini. Kami butuh kesadaran masyarakat yang lebih lagi hal yang mendukung pertanyaan ini karena ada alasan juga, yaitu dengan hadirnya PNPM, itu sangat mempengaruhi. Masyarakat lebih banyak memberikan partisipasinya terhadap PNPM itu sendiri karena memang kegiatannya lebih menguntungkan untuk masyarakat. Padahal LPMD ini lah lembaga yang dibawa pengawasan pemerintah. Tetapi saya juga kecewa terhadap pemerintah terkait dengan dana yang diturunkan kepada kami. Kami terbatas melakukan kegiatan juga karena dan yang diturunkan tidak sesuai, jadi kami hanya bisa melakukan secukupnya saja berbeda dengan yang dilakukan PNPM karena mereka juga memang didukung dengan keuangannya. Jadi terkadang tidak heran juga kalo kenyataannya masyarakat lebih condong ke kegiatan yang dilakukan PNPM itu. Jadi saya juga berharap pemerintah memperhatikan ini juga”.*⁵⁶

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam kebersamaan masyarakat dan LPMD maka aspirasi masyarakat, kinerja yang baik dari LPM akan diberikan dalam mewujudkan dan memenuhi harapan masyarakat secara bersama. Dalam memberikan kinerja yang baik tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerjanya didalam menjalankan tugasnya masing-masing baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Adapun faktor pendukung yang menunjukkan bahwa masyarakat yang ikut serta aktif dalam merencanakan pembangunan yaitu tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat dan utamanya kesadaran atau kemauan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan, yaitu : Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Patani merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya beberapa program tahunan yang telah direncanakan. Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar

⁵⁶ Zainal hasibuan Ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 april 2023

program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa.

Hasil wawancara dengan Ketua LPM Desa Pintu Padang terkait dengan faktor yang mempengaruhi pembangunan desa menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung yang lain adalah partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan masukan terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja agar pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat”⁵⁷

Adapun faktor yang menjadi penghambat yang bisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik, yaitu:

a. Dana

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pintu Padang. Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah Desa Pintu Padang mengungkapkan bahwa faktor utama pembangunan di Desa Pintu Padang adalah Dana.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pintu Padang terkait dengan faktor yang mempengaruhi pembangunan menyatakan bahwa:

“Sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi pembangunan itu memang dari segi dana meskipun pada kenyataannya dana dari

⁵⁷ Zainal Hasibuan, Ketua LPMD Desa Pintu Padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 25 april 2023

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum cukup untuk memaksimalakan pembangunan yang ada di desa, namun dengan bantuan dana tersebut setidaknya sudah bisa membantu kita dalam membangun secara bertahap”⁵⁸

b. SDM yang masih minim

Faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan bahwa SDM yang masih minim menunjukkan lemahnya tingkat SDM yang ada di desa. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat yang aktif di Desa Pintu Padang tidak semua memiliki keaktifan yang sama sesuai dengan informasi yang didapat dari salah satu masyarakat, bahwa :

“iya memang saya tahu kalau ada rapat Musrembang, tetapi saya tidak ikut rapat tersebut, sebab saya hanya mengikut dengan hasil keputusan dari pihak desa. Apa yang sudah jadi keputusan yah saya mengikut saja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah seorang informan selaku masyarakat Desa Pintu Padang bahwa masyarakat di Desa Pintu Padang kurang peduli terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka hanya mengikuti apa hasil keputusan musrenbangdes tanpa ikut serta dalam musrenbangdes tersebut. Terkait dengan pernyataan dari masyarakat seperti di atas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pintu Padang masih kurang kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi dengan zaman sekarang gotong-royong dan kebersamaan

⁵⁸ Khoiruddin, kepala desa pintu padang, wawancara di Desa Pintu Padang pada 20 april 2023

sudah sangat berkurang, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga ini memiliki dan peran sebagai pembersama masyarakat walaupun pada dasarnya disebutkan bahwa LPMD sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah dengan menggunakan masing-masing indikatornya.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai fasilitator

- 1) Masyarakat dan LPMD secara bersama merencanakan pembangunan
- 2) Masyarakat bersama LPMD Menentukan Prioritas Usulan Program

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Mediator

c. Masyarakat bersama LPMD ikut dalam rapat yang diadakan

Masyarakat bersama LPMD saling Memberikan Informasi Bagi Berjalannya Program Pembangunan

d. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagai motivator

- 1) Masyarakat Memamfaatkan Pembangunan yang Sudah Dibangun
- 2) Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan yang Sudah Dibuat.

e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator

- 1) LPMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan Program Pembangunan.
- 2) Masyarakat dan LPMD Melakukan Evaluasi pada Program Pembangunan

Adapun faktor yang menjadi penghambat yangbisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik, yaitu:

- c. Dana
- d. SDM yang masih minim

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari program Pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa sehingga partisipasi masyarakat akan lebih aktif sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pintu Padang. Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah Desa Pintu Padang mengungkapkan bahwa faktor utama pembangunan di Desa Pintu Padang adalah Dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marbun, BN. 1998. *Proses Pembangunan Desa*. Elrlangga: Jakarta
- Mikkelsen, Britha. (2006). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexi J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Mubyarto.(1984).*Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Nafidah dan Suryaningtyas. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pangestu Prayogi, A, I. 2017. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tanjung Batu”. *eJournal Ilmu Pemerintahan*.
- sPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 29 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan*
- Rahayu, MD. 2018. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinar Sari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Diakses pada tanggal 06 Januari 2019.
- Siagian, Sondang P.(1994).*Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1986). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Suntingan LP3ES.
- Sugiyono.(2012).*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005:67-68). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Manajemen Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001

Widjaja, Prof. Drs. HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.